

BAB III

PERAN NGO TLACHINOLLAN DALAM ADVOKASI KASUS BENDUNGAN LA PAROTA

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai advokasi yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan untuk mengadvokasi masyarakat yang terdampak dan dilanggar hak-haknya oleh pemerintah Meksiko dalam proyek pembangunan bendungan La Parota. Untuk menjelaskan advokasi yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko dalam proyek pembangunan bendungan La Parota akan digunakan model Boomerang Pattern oleh Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink.

Konsep Transnational Advocacy Network oleh Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink menjelaskan bagaimana perilaku sebuah NGO dalam melakukan advokasi pada suatu kasus. Pada dasarnya, tujuan dari sebuah advokasi adalah untuk mengubah perilaku dari suatu negara atau organisasi internasional. Salah satu cara yang digunakan oleh para aktifis atau NGO untuk mencapai tujuan itu adalah dengan membangun jaringan baik dengan pihak lain yang bersifat melintasi batas negara. Hal ini dilakukan karena dengan membangun jaringan yang bersifat transnasional NGO dapat mempengaruhi pihak yang memiliki power atau posisi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka, atau untuk memperkenalkan dan mempromosikan gagasan-gagasan baru, menyalurkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan gagasan atau advokasi, dan membuka jalur-jalur untuk melakukan lobi. Perilaku Transnational Advocacy Network ini dilakukan oleh NGO lokal pada isu-isu dan permasalahan dimana NGO lokal memandang bahwa dengan memperluas jaringan NGO lokal dapat mempromosikan gagasan atau kampanye yang dibawa dengan lebih efektif dan lebih luas; dengan membangun jaringan

internasional, NGO lokal dan NGO internasional dapat membuat pertemuan dan konferensi internasional dimana NGO lokal dapat memperkuat dan memperluas jaringan yang ada dan menjadi salah satu tempat untuk menarik perhatian masyarakat internasional akan isu atau gagasan yang dibawa oleh NGO lokal; dan ketika jalur komunikasi antara NGO atau kelompok lokal dengan pemerintah untuk mencapai tujuan terhalang atau tidak efektif, yang kemudian NGO lokal berusaha mempengaruhi pihak-pihak luar untuk menekan pemerintah mereka agar tujuan dapat tercapai dan perilaku Transnational Advocacy Network akan membentuk sebuah pola yang dikenal dengan Boomerang Pattern.

Konsep Transnational Advocacy Network dapat dijelaskan polanya dengan model Boomerang Pattern. Pada model Boomerang Pattern, digambarkan bagaimana pola sebuah NGO ketika melakukan sebuah advokasi. negara merupakan aktor yang berperan sebagai penjamin hak-hak rakyatnya terpenuhi. Di lain sisi, negara terkadang menjadi pelaku dari pelanggaran hak-hak rakyatnya. Ketika pemerintah tersebut menjadi pelaku dari pelanggaran hak-hak tersebut, negara sering kali komunikasi dari rakyat atau NGO yang melakukan advokasi bagi rakyat yang dilanggar hak-haknya terhalang. Negara tidak mau mendengarkan aspirasi dan kehendak yang diinginkan oleh rakyatnya. Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, ketika komunikasi antara NGO dan negara terhalang, sebuah NGO akan mencari jalur lain untuk menekan pemerintahnya agar permintaan masyarakat lokal yang disampaikan melalui NGO tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintahnya. NGO lokal akan menggunakan jaringan-jaringan yang dimiliki baik lokal maupun jaringan internasional. NGO di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara selatan yang kekuatannya kecil akan meminta bantuan dari NGO ataupun pemerintah di negara-negara maju atau negara-negara utara yang memiliki power lebih besar untuk menekan pemerintahnya baik secara langsung maupun melalui perantara organisasi internasional.

Aktor-aktor yang biasanya terlibat dalam Transnational Advocacy Network adalah NGO internasional dan lokal, kelompok pergerakan lokal, yayasan-yayasan, media, gereja atau serikat dagang, intergovernmental organization, dan bagian dari parlemen atau eksekutif pemerintahan suatu negara, meskipun dalam Transnational Advocacy Network aktor yang memiliki peran penting adalah NGO baik lokal atau internasional. NGO Tlachinollan sebagai NGO lokal yang berasal dari negara bagian Guerrero dan bergerak di bidang hak asasi manusia berusaha membantu gerakan sosial masyarakat yang terdampak dari pembangunan bendungan La Parota yang tergabung dalam CECOP untuk menekan pemerintah Meksiko agar pemerintah mau menghentikan pembangunan bendungan tersebut.

Sejak tahun 2003 pemerintah Meksiko melalui CFE mulai mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi bendungan. Mesin-mesin didatangkan ke lokasi proyek pembangunan bendungan dan mulai memotong pepohonan dan membersihkan ladang-ladang pertanian milik masyarakat yang mana hal ini merupakan tindakan kriminal dan pemerintah tidak berhak mengambil alih secara paksa karena status lahan masih dibawah kepemilikan masyarakat sesuai konstitusi Meksiko artikel 27 tahun 1917. Penolakan kemudian datang dari masyarakat yang marah karena para pekerja memotong pepohonan dan merusak ladang pertanian milik masyarakat yang disebabkan kurangnya pemberitahuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang nantinya terdampak dari adanya pembangunan bendungan La Parota ini. Masyarakat kemudian membentuk sebuah gerakan yang menolak pembangunan ini bernama CECOP. Selain itu masyarakat menutup akses jalan menuju lokasi pembangunan bendungan sehingga alat-alat berat dan mesin tidak bisa masuk ke lokasi.³⁷ Melihat

³⁷Monti Aguirre, "Interview: Victory Over Mexico's La Parota Dam", <https://www.internationalrivers.org/resources/interview-victory-over-mexico-s-la-parota-dam-1773> diakses pada 8 November 2017

pemerintah Meksiko berusaha untuk merampas tanah milik masyarakat Guerrero untuk membangun bendungan La Parota, NGO Tlachinollan akhirnya memutuskan untuk melakukan advokasi bagi masyarakat Guerrero dengan melakukan pendampingan bagi CECOP agar mengubah kebijakan pembangunan bendungan La Parota.

CECOP dengan dampingan NGO Tlachinollan bersama-sama berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko untuk menghentikan pembangunan bendungan La Parota yang merampas hak-hak mereka. Untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko, CECOP dan NGO Tlachinollan melakukan upaya-upaya baik dalam skala nasional maupun internasional. Penjelasan mengenai upaya-upaya CECOP dan NGO Tlachinollan akan diuraikan dalam beberapa sub-bab, yaitu: upaya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari dalam negeri, upaya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari luar negeri, dan respon pemerintah Meksiko dalam menghadapi tekanan internasional.

A. Upaya untuk Mempengaruhi Pemerintah Meksiko dari Dalam Negeri

Setelah pemerintah Meksiko melakukan banyak pelanggaran bagi hak-hak masyarakat, CECOP dengan dampingan NGO Tlachinollan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari dalam negeri. NGO Tlachinollan dengan sumber daya manusianya mencoba untuk menyalurkan data-data analisis yang berguna bagi CECOP untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko agar mau menghentikan pembangunan bendungan La Parota. Salah satu upaya yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan bersama CECOP adalah dengan mengajukan kasus ini ke pengadilan agraria Meksiko. Hal ini dilakukan setelah CFE bersama presiden properti komunal Cacahuatpec Crescencio Jeronimo Aparicio membuat sebuah sidang pertemuan pada tanggal 25 April 2004 yang isinya membahas pengambil-alihan lahan milik

masyarakat yang masuk dalam lokasi pembangunan bendungan La Parota. Dari hasil pemungutan suara pada sidang tersebut dinyatakan bahwa pengambil-alihan lahan disetujui oleh masyarakat.

CECOP dan NGO Tlachinollan bersama dengan 1590 pemilik lahan komunal kemudian mendatangi pengadilan agraria Meksiko pada 24 Juni 2004. Mereka datang dengan tujuan untuk membatalkan hasil pertemuan yang dilakukan pada 25 April lalu bersama CFE dan presiden properti komunal Cacahuatpec. Mereka ingin membatalkan hasil pertemuan tersebut karena pertemuan tersebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sidang pengambil-alihan lahan, seperti pada pertemuan tersebut tidak memenuhi kuota jumlah pemilik lahan untuk diambil suaranya sebanyak dua per tiga dari total pemilik lahan berdasarkan hukum agraria Meksiko, pada pertemuan tersebut terdapat tanda tangan orang-orang yang telah mati, dan adanya praktik suap agar orang-orang yang seharusnya tidak berhak mau untuk menanda-tangani persetujuan pengambil-alihan lahan oleh CFE agar lokasi pembangunan bendungan dapat dibebaskan, dan pemungutan suara hanya dilakukan tidak lebih dari tiga puluh menit.³⁸ Pengadilan agraria kemudian memenangkan gugatan yang diajukan oleh CECOP tersebut.

Pemerintah Meksiko tidak berhenti berusaha untuk merampas lahan-lahan milik para petani. Berdasarkan konstitusi Meksiko tahun 1917 dengan amandemen tahun 2007 artikel 27, pengambil-alihan lahan milik grup atau lahan komunal tidak bisa dilakukan oleh elit politik seperti gubernur melainkan harus melalui pengadilan agraria dengan pemungutan suara, maka dari itu pemerintah Meksiko melalui CFE berusaha membuat sidang

³⁸ Silvia Emanuelli, loc. cit.

pertemuan lainnya untuk membahas pengambil-alihan lahan milik para petani. CFE kemudian membuat sidang pertemuan lainnya pada tahun berikutnya tepatnya pada 23 Agustus 2005. Pertemuan ini dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk melegalkan pengambil-alihan lahan milik para petani di lahan komunal.

Kecurangan-kecurangan yang sebelumnya terjadi pada sidang pertemuan yang dilakukan pada 24 Juni 2004 itu dilakukan kembali oleh CFE dimana kuota yang seharusnya mencapai batas minimal sebanyak dua per tiga tidak tercapai. Karena kuota minimal peserta tidak tercapai maka kesepakatan pengambil-alihan lahan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut tidak legal. Maka pada 30 Maret 2007 CECOP dan NGO Tlachinollan menggugat kembali keputusan yang dibuat pada 24 Juni 2004 tersebut. CECOP menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diantaranya adalah kuota minimal dan adanya tanda tangan palsu orang-orang yang tidak hadir dan tidak memberikan suaranya pada pemungutan suara tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang ada pengadilan agraria memenangkan gugatan yang diajukan oleh CECOP.

Pemerintah Meksiko dan CFE tidak berhenti sampai di sini, mereka kembali mencoba berusaha mengambil alih lahan komunal milik para petani. Pada 27 Desember 2005 pemerintah Meksiko bersama dengan CFE kembali membuat sidang pertemuan untuk ketiga kalinya agar pemerintah Meksiko bisa mengambil-alih lahan komunal. Sidang pertemuan ini kembali digugat oleh CECOP pada 1 Juni 2007 dengan alasan yang sama di mana tidak terpenuhinya kuota minimal pemungutan suara sebanyak dua per tiga dari pemilik lahan komunal. Dengan tidak terpenuhinya kuota minimal yang dibutuhkan untuk

melakukan pemungutan suara maka hasil keputusan dan persetujuan yang dibuat pada sidang pertemuan tersebut ilegal. CECOP kemudian kembali memenangkan gugatan tersebut di pengadilan agraria.³⁹

Sidang pertemuan keempat kembali dibuat oleh pemerintah Meksiko dan CFE untuk mengambil-alih lahan komunal milik para petani. Pada 16 Desember 2005 pemerintah Meksiko bersama dengan CFE membuat sebuah sidang pertemuan di salah satu daerah yang terdampak yaitu Dos Arroyos. Kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada sidang-sidang sebelumnya terjadi pula pada sidang ini. Sidang ini kemudian kembali digugat pada 17 Mei 2007 dan pengadilan agraria kembali memenangkan CECOP pada gugatan ini karena sidang yang diadakan tidak memenuhi syarat-syarat dan membatalkan keputusan yang dihasilkan pada sidang tersebut.⁴⁰

Uji AMDAL bagi La Parota dibuat pada tahun 2004 yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada kementerian lingkungan Meksiko dan menyatakan kelayakan pembangunan bendungan tersebut pada tahun 2005.⁴¹ Namun pada Maret 2005 CECOP dan NGO Tlachinollan bersama para petani membuat sebuah petisi yang meminta peninjauan ulang hasil dari AMDAL bagi proyek pembangunan bendungan La Parota tersebut.⁴²

³⁹Tribunal Agraria invalida asamblea en favor de La Parota, Proceso, <http://www.proceso.com.mx/208703/tribunal-agrario-invalida-asamblea-en-favor-de-la-parota>, diakses pada 5 November 2017

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Luis Berga, *op. cit.*, hlm 1190

⁴² Silvia Emanuelli, *loc. cit.*

Pemerintah Meksiko dan CFE juga meminta bantuan presiden properti komunal Cacahuatepec untuk membujuk para pemilik lahan komunal agar mereka setuju dengan pengambil-alihan lahan mereka oleh CFE. Akhirnya pada 14 Agustus 2005 presiden properti komunal Cacahuatepec membuat pertemuan umum dengan para pemilik lahan komunal di kota Acapulco. Kemudian sidang umum lainnya dibuat kembali pada 23 Agustus 2005 di kota San Marcos untuk membujuk para pemilik lahan komunal agar menyetujui pengambil-alihan lahan mereka.

Namun pada 7 September 2005 sebanyak 3282 orang pemilik lahan komunal bersama CECOP dan NGO Tlachinollan mendatangi pengadilan agraria Meksiko untuk menggugat keputusan yang dibuat pada pertemuan di tanggal 14 dan 23 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa pemilik lahan komunal menyetujui pengambil-alihan lahan mereka. Masyarakat menggugat keputusan itu karena pada pertemuan itu ada praktik suap agar pemilik lahan mau menyetujui pengambil-alihan lahan, dan juga adanya aparat kepolisian yang menghalang-halangi masyarakat yang akan mendatangi pertemuan tersebut. Gugatan yang diajukan pada 7 September 2005 kepada pengadilan agraria kemudian dikabulkan oleh pengadilan pada 17 Agustus 2005. Pengadilan agraria Meksiko mengabulkan gugatan CECOP dan NGO Tlachinollan menimbang adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada sidang umum yang diadakan oleh presiden properti komunal Cacahuatepec.⁴³

Selain mengajukan gugatan-gugatan kepada pemerintah Meksiko melalui pengadilan agraria, mereka berupaya menekan pemerintah Meksiko deklarasi bersama masyarakat-masyarakat lain yang terdampak dari pembangunan bendungan di daerah lain di Meksiko seperti

⁴³ Ibid

pembangunan bendungan La Yesca di negara bagian Jalisco yang tergabung dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan nama *Mexican Movement of Dam-Affected People and in Defense of Rivers* atau MAPDER. Deklarasi oleh MAPDER telah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2004, 11-14 Maret 2005, dan 18 Maret 2006. Diantara isi dari deklarasi tersebut adalah meminta pemerintah Meksiko untuk menghentikan proyek pembangunan bendungan La Parota dan bendungan lain seperti El Cajon, dan La Yesca, dan pengusutan kasus pembunuhan orang-orang yang menentang pembangunan bendungan seperti Eduardo Maya Manrique.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko agar menghentikan proyek pembangunan bendungan La Parota dari dalam negeri tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga orang yang dibunuh akibat menentang pembangunan bendungan La Parota diantaranya adalah anggota CECOP Eduardo dan tetangganya yang berusaha menolong Eduardo tanpa adanya tindak lanjut terhadap pelaku pembunuhan dan tindakan kriminalisasi kepada orang-orang lainnya yang menentang pembangunan bendungan seperti Marco Antonio Suastegui Muñoz dan Francisco Valeriano selama NGO Tlachinollan dan CECOP melakukan upaya-upayanya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari dalam negeri.⁴⁵

⁴⁴ Second MAPDER Forum Declaration, International Rivers, op. cit., Final Declaration Third National Encounter of Dam-Affected People and in Defense of Rivers, https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/mapder_third_0.pdf, diakses pada 5 November 2017

⁴⁵ Silvia Emanuelli, loc. cit.

B. Upaya untuk Mempengaruhi Pemerintah Meksiko dari Luar Negeri

Sebagai mana yang dijelaskan pada model Boomerang Pattern, ketika upaya untuk menekan pemerintah tidak efektif maka NGO lokal akan mencari dukungan dari luar negeri baik melalui NGO internasional, negara, atau organisasi internasional yang kemudian aktor lain tersebut akan mempengaruhi pemerintah NGO lokal tersebut. Begitu juga dengan yang terjadi pada NGO Tlachinollan bersama CECOP, setelah upaya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari dalam negeri berjalan tidak efektif, NGO Tlachinollan dan CECOP berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari luar negeri. NGO Tlachinollan menggunakan jaringan-jaringan NGO yang berada di luar negeri agar CECOP dapat menggunakan jaringan-jaringan yang ada untuk menekan pemerintah Meksiko dari luar. Selain itu NGO Tlachinollan berusaha untuk mencari perhatian masyarakat internasional tentang pelanggaran HAM yang ada di Meksiko akibat adanya pembangunan bendungan La Parota. Dalam kegiatan advokasi transnasional yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan, mereka menemui beberapa pihak yang dianggap dapat menekan pemerintah Meksiko agar menghentikan pembangunan bendungan La Parota yang melanggar hak asasi manusia.

1. Jerman

Salah satu upaya yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dari luar adalah melakukan kegiatan jejaring advokasi transnasional dengan NGO internasional yang memiliki cabang di Meksiko yaitu The German Institute for Human Rights dan juga bantuan dari the International Institute for Food and Development Policy atau dikenal dengan Food First, sebuah NGO

yang berkonsentrasi di bidang pangan dan pembangunan yang berbasis di Amerika Serikat.

The German Institute of Human Rights dan Food First, NGO Tlachinollan dan CECOP dapat pergi ke Jerman dan beberapa negara lainnya Belgia, dan Swiss untuk menyebarkan berita tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko dalam pembangunan bendungan La Parota dan menggalang dukungan masyarakat internasional. Dalam kunjungan di Jerman, NGO Tlachinollan dan CECOP menemui beberapa anggota parlemen Jerman dan juga Uni Eropa lalu meminta dukungan mereka dan membantu menekan pemerintah Meksiko agar mau menghentikan pembangunan bendungan La Parota yang melanggar hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain menemui parlemen Jerman dan Uni Eropa, NGO Tlachinollan dan CECOP menemui UN dan cabang-cabangnya yang menangani hak asasi manusia dan juga ILO.⁴⁶

Jerman menjadi negara tujuan bagi NGO Tlachinollan dan CECOP dalam upaya untuk meminta dukungan pada kasus pembangunan bendungan La Parota karena beberapa sebab, yaitu:

a. Jerman Sebagai Anggota Human Rights Council

Dipilihnya Jerman sebagai negara tujuan untuk mencari dukungan bagi NGO Tlachinollan dan CECOP tidak serta merta karena Jerman adalah sebuah negara maju, akan tetapi Jerman merupakan salah satu anggota pendiri dari Human Rights Council

⁴⁶ La Parota Dam Follow Up, Habitat International Coalition, <http://www.hic-gs.org/topdf.php?type=A&pid=2150>, diakses pada 3 November 2017, hlm 5

sebagai penerus dari United Nations Commission on Human Rights pada tahun 2006. Posisi Jerman sebagai salah satu anggota pendiri Human Rights Council menjadikan Jerman sebagai salah satu anggota penting dalam badan Human Rights Council, dan dengan posisi tersebut kekuatan yang dimiliki oleh Jerman lebih besar untuk menekan pemerintah Meksiko agar menghentikan pelanggaran HAM pada proyek pembangunan bendungan La Parota, dan juga NGO Tlachinollan bersama CECOP dengan bantuan Jerman bisa mendapatkan koneksi kepada institusi lain yang bergerak di bidang hak asasi manusia⁴⁷.

b. The Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid

Jerman telah cukup lama aktif mempromosikan hak asasi manusia, hal itu dibuktikan dengan adanya badan dibawah Kantor Luar Negeri Jerman atau *Auswärtiges Amt* yang mengurus kebijakan-kebijakan luar negeri Jerman yang terkait dengan hak asasi manusia. Badan itu bernama The Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid.

The Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid telah didirikan

⁴⁷ German Embassy Harare, Germany's Commitment in the UN Human Rights Council, <http://www.harare.diplo.de/Vertretung/harare/en/03-foreign-policy/03-human-rights/2-1-human-rights-council.html>, diakses pada 30 November 2017

sejak tahun 1998 dan badan ini menjadi salah satu acuan dalam kebijakan luar negeri Jerman yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan memberi proposal-proposal terkait kebijakan luar negeri dalam bidang hak asasi manusia. Badan ini juga menangani bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Jerman, sebagai contohnya dalam kasus hak asasi manusia Jerman memberikan bantuan kemanusiaanya dalam bentuk advokasi. Hal ini menunjukkan keseriusan Jerman pada isu hak asasi manusia.

Karena The Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid menjadi salah satu acuan bagi Jerman dalam kebijakan luar negeri pada permasalahan hak asasi manusia membuat The Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid memiliki hubungan dengan institusi-institusi lain yang berpengaruh di Jerman seperti kementerian-kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat Jerman atau *Deutscher Bundestag*.⁴⁸

c. Proteksi bagi Aktifis Hak Asasi Manusia

Banyak dari para aktifis hak asasi manusia yang mempertaruhkan resiko-resiko yang besar termasuk nyawanya untuk memperjuangkan hak asasi manusia agar setiap orang mendapatkan dan terjamin hak-haknya. Karena keseriusan Jerman dalam isu hak asasi

⁴⁸ Auswärtiges Amt, Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/koordinatoren/mr-koordinatorin>, diakses pada 29 November 2017

manusia, berdasarkan hal itu Jerman memiliki kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia di negaranya masing-masing. Jerman dapat memberikan bantuan proteksi bagi para aktivis hak asasi manusia melalui jalur diplomatik seperti dengan memberikan suaka, atau memberikan bantuan finansial ketika dibutuhkan.⁴⁹

d. Hak atas Air Minum Bersih dan Sanitasi

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Banyak penyakit dan hal buruk lain yang disebabkan oleh sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan air minum yang bersih dan akses untuk mendapatkan sanitasi yang layak. Masih banyaknya masyarakat di dunia yang kesulitan untuk mendapatkan akses air minum yang bersih dan sanitasi membuat Jerman bersama dengan Spanyol aktif mengkampanyekan hak manusia atas air minum yang bersih dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikampanyekan oleh NGO Tlachinollan bersama dengan CECOP yaitu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak dengan menghentikan pembangunan bendungan La Parota.⁵⁰

⁴⁹ German Embassy Harare, Protection for Human Rights Defender, <http://www.harare.diplo.de/Vertretung/harare/en/03-foreign-policy/03-human-rights/2-2-human-rights-defenders.html>, diakses pada 30 November 2017

⁵⁰ German Embassy Harare, Human Right to Clean Drinking Water and Sanitation,

e. Amerika Latin Sebagai Fokus Kebijakan Luar Negeri Jerman

Amerika Latin merupakan salah satu regional yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Jerman. Jerman menjadikan Amerika Latin sebagai salah satu fokusnya dalam kebijakan luar negeri yang hubungannya didasari adanya ikatan kultural dan nilai-nilai bersama. Negara-negara di Amerika Latin terlebih Meksiko memiliki peran penting bagi Jerman salah satunya di bidang ekonomi, karena minimnya sumber daya alam di Jerman maka Jerman menggantungkan kebutuhannya akan sumber daya alam kepada negara-negara di Amerika Latin yang kaya akan sumber daya alam.⁵¹ Selain itu banyak dari perusahaan-perusahaan Jerman yang bertempat di Amerika Latin, dan jika pada salah satu perusahaan tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia hal ini dapat memicu tekanan-tekanan baik kepada perusahaan atau kepada pemerintah Jerman dan mempengaruhi perekonomian Jerman.

Jerman memberikan bantuan dan dukungan di bidang hak asasi manusia karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi

<http://www.harare.diplo.de/Vertretung/harare/en/03-foreign-policy/03-human-rights/2-4-drinking-water.html>, diakses pada 30 November 2017

⁵¹ Auswärtiges Amt, Wirtschaftsbeziehungen zu Lateinamerika, <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/lateinamerika/wirtschaft/201394>, diakses pada 30 November 2017

negara-negara di Amerika Latin terutama di bidang hak asasi manusia. Jerman berusaha mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia di negara-negara di Amerika Latin termasuk Meksiko seperti hak wanita, mempromosikan institusi yang demokratis, melindungi para imigran di garis perbatasan, dan melakukan investigasi pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.⁵²

f. The German Institute for Human Rights

The German Institute for Human Rights merupakan sebuah badan independen yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan bersifat *state-funded*. The German Institute for Human Rights dibiayai operasionalnya dengan dana yang didapatkan dari pemerintah Jerman. The German Institute for Human Rights memiliki beberapa perwakilan di beberapa negara salah satunya ada di Meksiko. Dengan adanya salah satu perwakilan the German Institute for Human Rights akan mempermudah NGO Tlachinollan dan CECOP untuk meminta dukungan dan bantuan dari Jerman agar pemerintah Meksiko menghentikan pelanggaran hak asasi manusia

⁵² Auswärtiges Amt, Förderung der Menschenrechte in Lateinamerika, <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussepolitik/regionaleschwerpunkte/lateinamerika/menschenrechte/201444>, diakses pada 30 November 2017

pada proyek pembangunan bendungan La Parota.⁵³

Upaya yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan bersama CECOP ketika melakukan Transnational Advocacy termasuk dalam kategori Leverage Politics , karena berdasarkan poin-poin di atas posisi yang dimiliki oleh Jerman lebih kuat dibandingkan posisi Meksiko sehingga dengan dukungan yang diberikan oleh Jerman suara NGO Tlachinollan dan CECOP akan lebih didengar oleh pemerintah Meksiko.

Hasil dari pertemuan NGO Tlachinollan dan CECOP dengan beberapa anggota parlemen Jerman dan UN di Eropa, pada bulan September 2007 beberapa utusan dari anggota parlemen Jerman mengunjungi Guerrero untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi. Selain anggota parlemen Jerman, beberapa NGO di Jerman seperti FIAN International juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada pemerintah Meksiko agar menghentikan tindakan yang melanggar HAM dalam pembangunan bendungan La Parota.⁵⁴

Pada 27 Februari 2008 perwakilan dari The German Institute for Human Rights Carola Haussoter mengunjungi Guerrero untuk mengumpulkan data-data terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Meksiko terkait pembangunan bendungan La Parota selama dua minggu. Data-data yang dikumpulkan digunakan untuk melakukan lobi selanjutnya kepada parlemen Jerman dan Uni Eropa agar mereka mau menekan pemerintah

⁵³ Facts About Germany, Protection of Human Rights, <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/foreign-policy/protection-human-rights>, diakses pada 29 November 2017

⁵⁴ La Parota Dam Follow Up, Habitat International Coalition, loc. cit.

Meksiko untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di pembangunan bendungan La Parota.⁵⁵

2. United Nations

Dua UN Special Rapporteur on Adequate Housing Miloon Kothari dan Special Rapporteur on Human Rights and Fundamental Freedom of Indigeneous People, Rodolfo Stavenhagen, pada 19 Oktober 2007 mengirim joint letter yang ditujukan kepada pemerintah Meksiko setelah sebelumnya keduanya melakukan kunjungan non-ofisial pada tahun 2004 dan secara resmi pada 7 sampai 11 September 2007 ke Meksiko yang berjudul “*Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del Proyecto Hidroelectrico de La Parota, Estado de Guerrero, Mexico*”. Dalam surat itu kedua UN Special Rapporteur menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko kepada masyarakat yang terdampak, menghargai pilihan masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bendungan dan himbauan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Comision Intereclesial de Justicia y Paz, “Manto de Impunidad y Negacion de Derechos Territoriales”,

<https://www.justiciaypazcolombia.com/manto-de-impunidad-y-negacion-de-derechos-territoriales/>, diakses pada 2 November 2017; Protectionline, “German Coordination Worried by Human Rights Situation in Guerrero”,

<http://protectionline.org/2008/02/27/german-coordination-worried-by-human-rights-situation-in-guerrero/>, diakses pada 2 November 2017

⁵⁶ Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standart of Living, and on the Right to Non-discrimination in this Context, Miloon Kohtari –

NGO Tlachinollan juga menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran HAM pada pembangunan bendungan La Parota kepada masyarakat internasional untuk menggalang dukungan dari mereka. Informasi ini kemudian digunakan oleh NGO lain untuk menekan pemerintah Meksiko atau NGO tersebut menyebarkannya lagi kepada NGO lain agar isu yang diangkat semakin meluas dan diketahui oleh banyak orang. NGO internasional lain yang menganggapi kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Meksiko pada proyek pembangunan bendungan La Parota ini adalah Amnesty International. Amnesty International terus memantau perkembangan dari pelanggaran HAM yang terjadi di proyek pembangunan La Parota ini dan juga menyebarkan berita ini. Keseriusan Amnesty International untuk ikut andil dalam menangani kasus ini adalah dengan adanya kunjungan Sekretaris Jendral Amnesty International Irene Khan.

Irene Khan melaksanakan misi high level Amnesty International dengan mengunjungi Meksiko dan menemui presiden Meksiko Felipe Calderon untuk membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM yang terjadi di Meksiko. Irene mengunjungi Meksiko pada 31 Juli 2007 sampai 4 Agustus 2007. Selama Irene berada di Meksiko ia mengunjungi daerah-daerah yang terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM dan salah satunya adalah lokasi pembangunan bendungan La Parota di Guerrero. Setelah mengunjungi daerah-daerah yang terdapat pelanggaran

Addendum – Summary of Communication Sent and Replies
Received from Governments and other Actors, UN,
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/113/38/PDF/G0811338.pdf?OpenElement>, diakses pada 4 November 2017, hlm 47

HAM Irene menemui presiden Meksiko Felipe Calderon dan meminta untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menghentikan penggunaan militer sebagai alat penegak hukum di ranah publik serta meningkatkan profesionalitas aparat kepolisian dan melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia pada kebijakan-kebijakan yang dibuat.⁵⁷

Banyak NGO lain yang ikut membantu menyebarkan berita tentang kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada proyek pembangunan bendungan La Parota. Diantara NGO internasional yang ikut serta menyebarkan berita ini adalah Habitat International Coalition, International Rivers juga rutin untuk memantau kondisi terkini dan memberitakannya. Servicio para la Paz ikut menjadi pihak yang membantu menyebarkan berita-berita terkini dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di proyek pembangunan bendungan La Parota.

Dengan semakin banyaknya berita yang menceritakan pelanggaran HAM yang terjadi di Meksiko pada proyek pembangunan bendungan La Parota, semakin banyak masyarakat di luar Meksiko yang mengetahui hal tersebut. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pula dukungan terutama dari NGO dan kelompok-kelompok lain baik yang berkaitan dengan hak asasi manusia maupun kelompok lain. Beberapa NGO dan kelompok lain membuat sebuah joint letter yang ditujukan kepada European Union – Mexico Parliamentary Committee terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko

⁵⁷ Amnesty International, “Mexico: Amnesty International Completes High Level Mission – President Felipe Calderon Commits to Human Rights”, <https://archive.amnesty.ie/content/mexico-amnesty-international-completes-high-level-mission-president-calderon-commits-human-r>, diakses pada 7 November 2017

pada proyek pembangunan bendungan La Parota, dan diantara NGO tersebut adalah Amnesty International, ACAT Action des Chretiens pour l'abolition de la Torture, Diaconia Human Rights Germany, FIAN International, dan Servicio para la Paz.⁵⁸

Upaya-upaya Transnational Advocacy yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan dan CECOP dengan menyebarkan berita-berita dan data-data yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada proyek pembangunan bendungan La Parota termasuk dalam kategori Information Politics.

Upaya Leverage Politics lain yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan untuk menekan pemerintah Meksiko adalah dengan mengajak CECOP untuk membuat petisi yang mengenai kasus pelanggaran HAM di pembangunan bendungan La Parota ke Water Tribunal Latin America. Terdapat lima poin yang diangkat pada petisi yang dibuat pada 6 Februari 2005 tersebut, yaitu: meminta pemerintah Meksiko untuk membatalkan pembangunan bendungan La Parota; melakukan uji kelayakan ulang dengan mempertimbangkan dampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; menghargai hukum yang berlaku dimana sejak awal kali diadakannya sidang pertemuan pengambil-alihan lahan CFE banyak melakukan kecurangan-kecurangan demi tercapainya tujuan

⁵⁸ Zacarias Cervantes El Sur, "Alertan ONG al Parlamento Europeo de riesgos de defensores y periodistas en Guerrero y Mexico",

<http://www.NGO>

Tlachinollan.org/respaldo/index.php?option=com_k2&view=item&id=2588:alertan-ong-al-parlamento-europeo-de-riesgos-de-defensores-y-periodistas-en-guerrero-y-me%CC%81xico&Itemid=638&lang=es,

diakses pada 7 November 2017

pemerintah Meksiko; adanya kasus ini di Water Tribunal Latin America sudah menjadi konsekuensi dan *social cost* di mana banyak terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan bendungan; dan merekomendasikan pemerintah Meksiko agar menghilangkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mematuhi hukum yang berlaku.⁵⁹

C. Respon Pemerintah Meksiko dalam Menghadapi Tekanan Internasional

Berbagai upaya telah dilakukan oleh NGO Tlachinollan bersama dengan CECOP untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko agar menghentikan pembangunan bendungan La Parota karena melanggar banyak hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Setelah upaya yang dilakukan dari dalam negeri tidak berjalan efektif kemudian upaya untuk mempengaruhi pemerintah Meksiko dilakukan dari luar negeri.

Pemerintah Meksiko menerima joint letter yang diberikan oleh dua UN Special Rapporteur pada 19 Oktober 2007 yang berjudul “*Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del Proyecto Hidroelectrico de La Parota, Estado de Guerrero, Mexico*”, kemudian pemerintah Meksiko memberikan responnya dengan membalas surat tersebut yang isinya menyatakan:

⁵⁹ Tribunal Latinoamericano del Agua, Petitoria, https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/petitoria_tribunal_latinoamericano_del_agua.pdf, diakses pada 28 Oktober 2017

- Pemerintah Meksiko berterima kasih atas perhatian dua UN Special Rapporteur kepada isu hak asasi manusia di Meksiko.
- Pemerintah Meksiko setuju bahwa proyek-proyek besar seperti pembangunan bendungan perlu dipelajari segala perspektifnya dan menghargai aspek-aspek yang tercakup di dalamnya seperti hak asasi manusia; proyek pembangunan bendungan La Parota telah melalui proses yang panjang, dan terkait sedikitnya informasi yang didapat oleh masyarakat yang terdampak dikarenakan akses yang dapat digunakan diblokade oleh masyarakat itu sendiri sehingga menyulitkan akses menuju daerah-daerah yang terdampak
- Terkait relokasi bagi masyarakat yang terdampak, lokasi untuk relokasi masyarakat tidak akan lebih dari satu kilometer, bahkan beberapa usulan lokasi hanya berjarak 50 meter.⁶⁰

Pada bulan September 2009, pemerintah Meksiko akhirnya menunda pembangunan bendungan La Parota dikarenakan banyaknya tekanan dari pihak-pihak yang menentang pembangunan bendungan La Parota dan buruknya kondisi perekonomian di Meksiko sedangkan dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membangun bendungan La Parota. Proyek bendungan La Parota ini ditunda pembangunannya dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2018. Namun berbagai macam tekanan masih diberikan kepada pemerintah Meksiko karena tuntutan

⁶⁰ Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and on the Right to Non-discrimination in this Context, Miloon Kohtari – Addendum – Summary of Communication Sent and Replies Received from Governments and other Actors, op. cit. hlm 54

yang diberikan bukanlah untuk menunda melainkan untuk membatalkan pembangunan bendungan La Parota.⁶¹

Tekanan terus-menerus diberikan kepada pemerintah Meksiko baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan pada tahun 2009 CECOP bersama dengan NGO Tlachinollan membuat sebuah petisi yang diberikan kepada presiden Felipe Calderon agar dipertemukan dengan CFE dan petisi tersebut berhasil, yang akhirnya NGO Tlachinollan bersama CECOP bisa bertemu dengan CFE pada 21 Mei 2009. Pada pertemuan antara CFE dan CECOP bersama NGO Tlachinollan, mereka bersikeras bahwa pembangunan bendungan La Parota harus dibatalkan. Pada tahun 2010 presiden Felipe Calderon mendatangi daerah yang akan dijadikan lokasi pembangunan bendungan untuk menemui masyarakat yang terdampak oleh bendungan tersebut. Setelah pertemuan tersebut CECOP bersama NGO Tlachinollan menyusun sebuah dokumen persetujuan yang diberi nama *Acuerdos de Cacahuatpec*.

Namun proses penanda-tanganan persetujuan tersebut tidaklah berjalan lancar. Persetujuan itu harus ditandatangani oleh gubernur Guerrero Angel Guirre Rivero namun ia selalu enggan untuk menanda-tanganinya.

⁶¹ International Rivers, "Victory: Mexico's La Parota Dam Delayed Until 2018",

<https://www.internationalrivers.org/blogs/231/victory-mexico-s-la-parota-dam-delayed-until-2018>, diakses pada 29 Oktober 2017;

David Biller, "CFE Denies Cancellation of 900MW La Parota Hydro Project",

http://www.bnamericas.com/news/electricpower/CFE_denies_cancellation_of_900MW_La_Parota_hydro_project, diakses pada 29

Oktober 2017

Persetujuan itupun harus dirubah berkali-kali. Pada 12 Juli 2012, susunan persetujuan tersebut diratifikasi oleh pengadilan federal Meksiko yang poin-poinnya berisi: pembatalan pembangunan bendungan, menghentikan penggunaan aparat untuk membuat sidang pertemuan, mempromosikan pembangunan di daerah-daerah properti komunal, membangun kembali struktur sosial di area properti komunal, dan menghargai upaya yang dilakukan oleh CECOP sejak tahun 2003.⁶² Akhirnya dokumen *Acuerdos de Cacahuatpec* ditanda-tangani oleh gubernur Guerrero Angel Guirre Rivero dan perwakilan dari CECOP pada 16 Agustus 2012 yang berarti pemerintah Meksiko setuju untuk membatalkan pembangunan bendungan La Parota.⁶³

Keputusan pemerintah Meksiko untuk membatalkan pembangunan bendungan La Parota menunjukkan berhasilnya advokasi yang dilakukan oleh NGO Tlachinollan. Hal yang berbeda justru terjadi pada proyek bendungan El Cajon dan La Yesca. Pemerintah Meksiko membuat keputusan untuk tetap melanjutkan pembangunan bendungan El Cajon dan La Yesca meskipun ada penolakan yang datang dari masyarakat yang terdampak dan adanya pelanggaran hak asasi

⁶² Hector Briseño, "Aguirre Rivero Rechaza Poner Punto Final al Proyecto La Parota",

<http://www.jornada.unam.mx/2011/05/08/estados/031n1est>, diakses pada 12 November 2017; NGO Tlachinollan, "Tribunal Federal Ratifica Punto Final a la Presa La Parota", http://www.NGO.Tlachinollan.org/respaldo/index.php?option=com_content&view=article&id=2301%3Atribunal-federal-ratifica-punto-final-a-la-presa-la-parota&catid=319%3Aa-la-parota&Itemid=559&lang=es, diakses pada 11 November 2017

⁶³ Berklee Lowrey-Evans, loc. cit.

manusia pada proyek pembangunan bendungan El Cajon dan La Yesca. Selama proyek pembangunan bendungan El Cajon terdapat tiga puluh orang yang meninggal dan kelompok masyarakat terdampak yang tergabung dalam gerakan MAPDER menuntut pemerintah untuk melakukan investigasi terkait kematian tiga puluh orang tersebut. Begitu juga terdapat tindakan represif kepada orang-orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang menolak bendungan El Cajon salah satunya kepada Fransisco Villa.⁶⁴

⁶⁴ Final Declaration Third National Encounter of Dam-Affected People and in Defense of Rivers, loc. cit.